

Judul : Sistem PPDB Amburadul Roadmap Belum Siap
Tanggal : Jumat, 21 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 11



ANUGERAH KPAI 2023: Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah (kanan) bersama dengan Direktur Utama Media Indonesia Gaudensius Suhardi (kiri) berfoto bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (tengah), Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi (kedua dari kanan), Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadang Iskandar (kedua dari kiri) sesuai menyerahkan Piala Anugerah KPAI 2023 kepada kementerian yang telah berkontribusi dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak di Grand Studio Metro TV, Jakarta, kemarin.

Sistem PPDB Amburadul Roadmap belum Siap

PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) di sekolah tingkat dasar dan menengah (SD, SMP, SMA/SMK) yang amburadul selama beberapa tahun terakhir disebabkan oleh pemerintah tidak menjalankan kewajiban fungsi konstitusionalnya. Pengamat pendidikan Indra Charismadji mengatakan bahwa dalam Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 secara jelas berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.

"Hingga saat ini pemerintah tidak melaksanakan kewajiban itu. Amanat pasal tersebut seharusnya pemerintah menyiapkan sekolah yang cukup dan memastikan semua biaya ditanggung pemerintah," ujarnya.

Kisruh pelaksanaan PPDB yang terjadi selama tujuh tahun belakangan ini sesungguhnya akar masalahnya karena sekolah tidak cukup. "Harusnya itu dulu yang diatasi. Namun, pemerintah lebih suka bangun kereta cepat, IKN, mengurus rumpuk, bangun patung daripada bangun sekolah," ujar Indra dalam diskusi *Polemik Zonasi PPDB, Bagaimana Solusinya?* di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Indra juga menegaskan, jika permasalahan sistem PPDB belum juga diselesaikan dan pemerintah tidak membuat peta jalan pendidikan untuk jangka panjang, ancaman besar akan terjadi pada bangsa ini, yakni gagalnya menarik manfaat dari bonus demografi.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih juga menyoroti belum adanya *roadmap* (peta jalan) yang jelas untuk pendidikan Indonesia.

Wali Murid Jhon Oktaveri mengungkapkan kisruhnya pelaksanaan PPDB tahun ini juga diakibatkan kurangnya sosialisasi di masyarakat.

Beberapa komplain dari orang tua itu karena tidak mengerti, akhirnya berdebat sesama mereka. "Karena ada kasus jarak sekolah anaknya dengan tetangga sama, tetapi kok anak tetangga itu tidak diterima atau sebaliknya," ujar Jhon.

Belum lagi banyaknya oknum calo di lingkungan sekolah yang semakin membikin kacau pelaksanaan PPDB.

Pandangan senada juga disampaikan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang meminta Kemendikbud-Ristek agar mengevaluasi sistem zonasi PPDB. Salah satu alasan yang mendasar, menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, kemarin ialah belum meratanya sekolah negeri mulai jenjang SD-SMA di setiap kelurahan.

Kekacauan juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Sekelompok ibu kemarin melakukan aksi demo di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung mengeluhkan bahwa sistem zonasi dipenuhi kecurangan hingga jual beli bangku di kisaran harga Rp5 juta-Rp10 juta. (Dis/IL/ANI/1)

Kesejahteraan Anak Penentu Indonesia Jadi Negara Maju

Indeks perkembangan anak di seluruh dunia menempatkan Indonesia di peringkat 117 dari 180 negara. Ini berarti keluarga sebagai miniatur masyarakat dan bangsa belum sesuai harapan.

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

KESEJAHTERAAN anak merupakan salah satu indikator bagi Indonesia untuk menjadi negara maju dan unggul. Karena itu, Indonesia harus bebas dari tengkes (*stunting*), perkawinan anak, pelecehan dan kekerasan terhadap anak, serta eksploitasi anak.

"KPAI mencatat sebanyak 4.683 pengaduan pada tahun ini. Peran negara tentu harus mampu merespons dan menjawab tantangan ini.

Pelaporan masyarakat menunjukkan adanya kepercayaan publik dan harus kita respons dengan baik," ungkap Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah dalam acara Anugerah KPAI 2023 di *Metro TV*, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, KPAI telah melaksanakan berbagai agenda strategis untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak, di antaranya meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga, menekan eksploitasi yang dilakukan secara luring dan daring, pencegahan perkawinan anak, dan

upaya menghapus pekerja anak. "Sebagaimana mandat undang-undang, hadirnya lembaga pengawas seperti KPAI dan KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) bertujuan meningkatkan optimalisasi komitmen, diferensiasi, inovasi, dan penguatan layanan yang memberikan manfaat pada hal perlindungan anak," kata Ai.

KPAI pun telah menyusun Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak (PA) untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pada tahun ini, sebanyak 65% dari 43 K/L sudah mendaftarkan diri dalam SIMEP PA. Sementara itu, 68% provinsi di Indonesia juga sudah terdaftar.

Di tempat yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa berdasarkan riset WHO, indeks perkembangan anak di seluruh dunia memem-

patkan Indonesia di peringkat 117 dari 180 negara.

Indonesia tertinggal dari Singapura, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat peran KPAI dalam upaya perlindungan anak seperti penanganan tengkes, pelecehan seksual, pernikahan dini, dan lainnya.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak anak dengan mengoptimalkan layanan digital untuk edukasi publik. Perlu juga mendorong keterlibatan orangtua untuk melindungi anak.

Sementara itu, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menambahkan bahwa pemenuhan hak anak perlu menjadi perhatian bersama karena anak menjadi sepertiga jumlah penduduk Indonesia. "Betapa pentingnya berinvestasi kepada kualitas anak dengan perlindungan dari

kekerasan dan perlakuan salah lainnya," ucap Bintang.

Pendidikan karakter

Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengemukakan, berdasarkan hasil asesmen nasional (AN) tahun 2021 dan 2022 atau Rapor Pendidikan 2022 dan 2023, sebanyak 24,4% peserta didik menga-

lami berbagai jenis perundungan. Selain itu, hingga saat ini anak-anak juga masih rentan menjadi korban perundungan fisik, verbal, relasional, ataupun secara daring (*cyberbullying*).

"Saya juga masih sering mendengar miskonsepsi yang menganggap perundungan sebagai cara menguatkan mental peserta didik. Ini tidak benar karena pendidikan karakter semestinya tidak dilakukan dengan kekerasan yang bisa membuat anak-anak merasa takut dan trauma," ujar Nadiem dalam sambutannya pada kegiatan Bimbingan Teknis Roots Anti-Perundungan Angkatan VII di Tangerang, kemarin.

Program Roots Anti-Perundungan tahun 2023 tidak hanya fokus menyelenggarakan bimtek bagi para fasilitator guru, tetapi juga memastikan implementasi program di satuan pendidikan. (Dis/IL/1)